



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 58 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023;
  - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Dinas Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**BAB II****SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Dinas Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Dinas tahun lalu.

**Pasal 3**

- (1) Renja Dinas Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Dinas Tahun Anggaran 2023.

**BAB III****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT**

**TAHUN 2022 NOMOR 58**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 58 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA  
DINAS PERHUBUNGAN  
TAHUN 2023**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Dalam melaksanakan proses pembangunan setiap pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemerintah Kabupaten Garut wajib menyediakan perencanaan pembangunan yang akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan sehingga pada prosesnya nanti dapat dilakukan evaluasi berkenaan dengan keluaran dan hasil yang diperoleh.

Berdasarkan RPJMD Perubahan Kab. Garut tahun 2019-2024 yang kemudian di implementasikan dalam Renstra Dinas Perhubungan Perubahan Tahun 2019-2024 Dinas Perhubungan termasuk kedalam misi 3 Kabupaten Garut yaitu *Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang* dengan sasaran Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian.

Berdasarkan proses pembangunan yang telah berjalan, program pokok pokok Dinas Perhubungan masih melanjutkan program kerja sesuai Perubahan Renstra 2019-2024 yaitu mengatasi minimnya sektor sarana prasarana penunjang bidang perhubungan serta fasilitas perlengkapan jalan apabila diukur dari rasio kewenangan yang dimiliki seperti panjang jalan, luas wilayah pelayanan dan lain-lain. Berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam usaha terus konsisten untuk menentukan arah kebijakan yang mendukung untuk lima tahun kedepan dengan maksud adanya peningkatan yang signifikan berkaitan dengan keberadaan sarana prasarana perhubungan serta fasilitas perlengkapan jalan.

Sesuai dengan amanat presiden dalam sidang kabinet paripurna telah ditetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Dengan kebijakan mengakomodasi usulan Musrenbangnas, peningkatan kualitas keselamatan dan pelayanan, mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, serta mendukung persiapan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Hal tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Perhubungan untuk rencana kerja tahun 2023 berkenaan dengan kebijakan penyusunan anggaran difokuskan pada proyek-proyek yang sedang berjalan (pemenuhan target RPJMN, *Major Project*, dan Direktif seperti: PSN, Perpres, dan Kegiatan Prioritas). Kebijakan pemerintah pusat (Kementerian Perhubungan) tersebut di *break down* oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang diimplementasikan dalam program pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah sebagai upaya percepatan pemulihan kondisi ekonomi pasca dampak covid 19.

Untuk menjaga keselarasan perencanaan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan Pemerintah Daerah (RKPD 2023) dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Garut berupaya Upaya yang dilakukan Kondisi sebagaimana tersebut diatas terus diupayakan dapat teratasi oleh Dinas Perhubungan untuk memperkuat sarana dan prasarana perlengkapan jalan dalam rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk beberapa tahun kedepan.

Pada pelaksanaannya proses penyusunan Renja 2023 telah melewati berbagai tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Adapun tahapan – tahapan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah;

5. Perumusan rancangan akhir dan
6. Penetapan.

### **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 23, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);

31. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 23, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Garut tahun 2023 dimaksudkan untuk menyediakan perencanaan yang matang dan terukur demi tercapainya sasaran kinerja akhir sesuai RPJMD Perubahan 2019-2024 dan Renstra Perubahan Dinas Perhubungan 2019-2024. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja adalah :

- 1) Melaksanakan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
- 2) Sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan program kegiatan tahun anggaran 2023.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Memuat penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana kerja perangkat Daerah agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana kerja Tahun Lalu**

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada Anggaran dan pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan.

#### **Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah.

#### **Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Memuat rencana program dan kegiatan perangkat daerah beserta kebutuhan anggaran/ pagu indikatif.

#### **Bab V Penutup**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Renstra 2019-2024**

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Garut Pada tahun anggaran 2021 telah diaplikasikan kedalam 3 (tiga) Program, 15 kegiatan dan 29 Sub kegiatan.

Secara keseluruhan realisasi anggaran Program Kegiatan Tahun 2021 adalah sebesar 92,97% dengan pagu sebesar Rp. 43.535.091.157,- dari Pagu sebesar 46.826.252.580,- dengan rincian sebagai berikut :

##### **2.1.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Untuk realisasi program kegiatan tahun 2021 sesuai dengan dengan dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2021 yang telah ditetapkan maka uraiannya dapat dilihat pada penjelasan berikut dibawah ini :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran sebesar Rp. 40.434.744.880 dengan realisasi Rp. 37.237.895.727 atau sebesar 92,09 %. Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut :**

**1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mendapatkan anggaran sebesar Rp. 17.500.000 dengan realisasi Rp. 17.500.000 atau sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :**

1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah mendapatkan anggaran sebesar Rp. 17.500.000 dengan realisasi Rp. 17.500.000 atau sebesar 100%. sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya Dokumen Perencanaan dinas perhubungan dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah dokumen perencanaan dan hasil

yang dicapai adalah Tersedianya dokumen perencanaan;

**1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mendapatkan anggaran sebesar Rp. 16.802.627.754 dengan realisasi Rp. 14.985.922.161 atau sebesar 89,18%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :**

1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.853.127.754 dengan realisasi Rp. 13.039.082.161 atau sebesar 87,78%, hal ini karena adanya PNS yang memasuki masa purnabakti. sasaran sub kegiatan Tersedianya Gaji PNS dengan Keluaran sub kegiatan adalah jumlah PNS Dinas Perhubungan dan hasil yang dicapai adalah Terbayarkannya gaji PNS;

1.2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.949.500.000 dengan realisasi Rp. 1.946.840.000 atau 99,86%. sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya kinerja Pegawai Non PNS (TKK dan TKS) dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah pegawai Non PNS (TKK dan TKS) dan hasil yang dicapai adalah Terbayarkannya Honorarium ASN Non PNS;

**1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mendapatkan anggaran sebesar Rp. 509.199.700 dengan realisasi Rp. 483.693.840 atau sebesar 94,99%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :**

1.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor mendapatkan anggaran sebesar Rp. 17.500.000 dengan realisasi Rp. 17.500.000 atau 100%. sasaran sub kegiatan adalah Terjaganya kondisi penerangan kantor dengan Keluaran sub

kegiatan adalah Jumlah komponen peralatan listrik dan hasil yang dicapai adalah Terpeliharanya jaringan listrik kantor;

1.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mendapatkan anggaran sebesar Rp. 212.572.200 dengan realisasi Rp. 211.592.000 atau sebesar 99,53%. sasaran sub kegiatan adalah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dan hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor;

1.3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 53.371.000 dengan realisasi Rp. 53.371.000 atau sebesar 100%. sasaran sub kegiatan adalah Tersedianya barang cetakan dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah jenis barang cetakan dan hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan;

1.3.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 7.000.000 dengan realisasi Rp. 1.100.000 atau sebesar 15,71%. sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya pengetahuan ASN Dinas Perhubungan dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah koran dan majalah dan hasil yang dicapai adalah Tersedianya bahan bacaan;

1.3.5 Sub Kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu mendapatkan anggaran sebesar Rp. 21.286.000 dengan realisasi Rp. 21.275.500 atau sebesar 99,95%. sasaran sub kegiatan adalah Tersedianya makan minum pegawai dan tamu dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah makan minum pegawai dan tamu dan hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya makan minum pegawai dan tamu;

1.3.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD mendapatkan anggaran sebesar Rp. 197.470.500 dengan realisasi Rp. 178.855.340 atau sebesar 90,57%. Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya koordinasi eksternal urusan dinas dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah perjalanan dinas dan hasil yang dicapai adalah Terlaksananya perjalanan Dinas dalam dan luar daerah;

**1.4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mendapatkan anggaran sebesar Rp. 200.000.000 dengan realisasi Rp. 198.742.000 atau sebesar 99,37%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :**

1.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mendapatkan anggaran sebesar Rp. 200.000.000 dengan realisasi Rp. 198.742.000 atau sebesar 99,37%. Sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya prasarana dan fasilitas perkantoran dengan Keluaran sub kegiatan adalah Luas interior ruangan kantor dan hasil yang dicapai adalah Tersedianya ruangan kantor yang representatif;

**1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mendapatkan anggaran sebesar Rp. 22.529.725.426 dengan realisasi Rp. 21.188.156.055 atau sebesar 94,04%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :**

1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mendapatkan anggaran sebesar Rp. 22.421.611.626 dengan realisasi Rp. 21.080.166.505 atau sebesar 94,01%. Sasaran sub kegiatan adalah Terpenuhinya pembayaran rekening listrik dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah bulan pembayaran tagihan

listrik dan hasil yang dicapai adalah Terjaganya penerangan kantor;

1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor mendapatkan anggaran sebesar Rp. 108.113.800 dengan realisasi Rp. 107.989.550 atau sebesar 99,88%. sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya kebersihan kantor dengan Keluaran sub kegiatan Jumlah peralatan kebersihan, hasil yang dicapai adalah Terjaganya kebersihan kantor;

**1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mendapatkan anggaran sebesar Rp. 375.692.000 dengan realisasi Rp. 363.881.671 atau sebesar 96,85%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :**

1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 125.692.000 dengan realisasi Rp. 114.722.971 atau 91,27%, hal ini disebabkan adanya kendala teknis sehingga 2 kendaraan hibah belum bisa dibalik namakan. sasaran sub kegiatan Meningkatnya kondisi kend. dinas operasional, Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah kend. dinas operasional, hasil yang dicapai adalah Tersedianya kend. dinas operasional yang laik pakai;

1.6.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya mendapatkan anggaran sebesar Rp. 250.000.000 dengan realisasi Rp. 249.158.700 atau sebesar 99,66%. sasaran sub kegiatan Meningkatnya kondisi gedung kantor, Keluaran sub kegiatan Luas kantor UPTD yang direhabilitasi, hasil yang dicapai adalah Terpeliharanya gedung kantor dinas dan UPTD wilayah;

**2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) mendapatkan anggaran sebesar Rp.**

**6.241.507.700 dengan realisasi Rp. 6.152.749.430 atau sebesar 98,57%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :**

**2.1 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir mendapatkan anggaran sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasi Rp. 99.720.900 atau sebesar 99,72%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :**

2.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasi Rp. 99.720.900 atau sebesar 99,72%. sasaran sub kegiatan adalah Meningkatkan Lokasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian parkir umum dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian parkir umum dan hasil yang dicapai adalah Terlaksananya pengawasan dan pengendalian parkir umum;

**2.2 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor mendapatkan anggaran sebesar Rp. 670.902.700 dengan realisasi Rp. 664.147.800 atau sebesar 98,99%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :**

2.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor mendapatkan anggaran sebesar Rp. 200.300.000 dengan realisasi Rp. 197.099.900 atau sebesar 98,40%. sasaran sub kegiatan adalah Tersedianya Integrasi aplikasi pengujian ke Website Dinas Perhubungan, alat uji, upgrade Sistem Informasi pelayanan jasa perhubungan dengan Keluaran sub kegiatan adalah Integrasi aplikasi pengujian ke Website Dinas Perhubungan dan hasil yang dicapai

adalah Terintegrasinya aplikasi pengujian ke Website Dinas Perhubungan;

2.2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor mendapatkan anggaran sebesar Rp. 270.602.700 dengan realisasi Rp. 267.048.000 atau sebesar 98,68%. sasaran sub kegiatan adalah Tersedianya Kelengkapan Uji (Buku/Kartu Uji dan Stiker Uji) dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah kelengkapan uji (Buku/Kartu uji dan stiker uji) dan hasil yang dicapai adalah Terlaksananya proses pengujian kendaraan bermotor;

2.2.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor mendapatkan anggaran sebesar Rp. 200.000.000 dengan realisasi Rp. 199.999.900 atau sebesar 99,99%. sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya unjuk kerja alat pengujian kendaraan bermotor dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang di pelihara dan hasil yang dicapai adalah Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor;

**2.3 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000 dengan realisasi Rp. 2.983.505.050 atau sebesar 99,45%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :**

2.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.537.100.000 dengan realisasi Rp. 1.530.980.300 atau sebesar 99,60%. sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya PJU yang terbangun dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah PJU yang terbangun dan hasil yang dicapai adalah Terlaksananya pembangunan PJU;

2.3.2 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.462.900.000 dengan realisasi Rp. 1.452.524.750 atau sebesar 99,29%. sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya efisiensi dan efektivitas PJU dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah meteran listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang, dan hasil yang dicapai adalah Terpeliharanya Penerangan Jalan Umum (PJU);

**2.4 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.870.605.000 dengan realisasi Rp. 1.835.631.680 atau sebesar 98,13%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :**

2.4.1 Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.066.000.000 dengan realisasi Rp. 1.053.787.000 atau sebesar 98,85%. sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya dan pengamanan angkutan hari raya, natal dan tahun baru dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah lokasi pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya dan hasil yang dicapai adalah Terkendalinya operasional angkutan umum dan pengamanan angkutan hari raya;

2.4.2 Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mendapatkan anggaran sebesar Rp. 754.605.000 dengan realisasi Rp. 732.546.180 atau sebesar 97,07%. sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL)

yang terpasang, Rambu Lalin yang terpasang dan marka yang terpasang dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah rambu - rambu lalu lintas yang terpasang dan hasil yang dicapai adalah Tersedianya Rambu lalu lintas, CCTV, Rambu Papan nama jalan dan Marka Jalan;

2.4.3 Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran sebesar Rp. 50.000.000 dengan realisasi Rp. 49.298.500 atau sebesar 98,59%. sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang lalu lintas dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah sarana dan prasarana penunjang lalu lintas dan hasil yang dicapai adalah Tersedianya sarana prasarana penunjang lalu lintas;

**2.5 Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran sebesar Rp. 290.000.000 dengan realisasi Rp. 264.106.100 atau sebesar 91,07%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :**

2.5.1 Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran sebesar Rp. 290.000.000 dengan realisasi Rp. 264.106.100 atau sebesar 91,07%, hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan dalam melaksanakan temu wicara dengan pengelola angkutan karena adanya *social distancing* (dampak covid 19). sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya Dokumen data base angkutan barang, peserta Temu wicara pengelola angkutan umum, Shelter/ halte angkutan umum dan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan

umum dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah dokumen data base angkutan barang dan hasil yang dicapai adalah Tersedianya dokumen data base angkutan barang;

**2.6 Kegiatan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran sebesar Rp. 20.000.000 dengan realisasi Rp. 19.999.800 atau sebesar 99,99%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :**

2.6.1 Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran sebesar Rp. 20.000.000 dengan realisasi Rp. 19.999.800 atau sebesar 99,99%. sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya kendaraan tidak bermotor yang terkendali dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah kendaraan tidak bermotor yang terkendali dan hasil yang dicapai adalah Terkendalnya kendaraan tidak bermotor yang beroperasi pada hari raya;

**2.7 Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran sebesar Rp. 140.000.000 dengan realisasi Rp. 136.225.000 atau sebesar 97,30%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :**

2.7.1 Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota mendapatkan anggaran sebesar Rp. 140.000.000 dengan realisasi Rp. 136.225.000 atau sebesar 97,30%. sasaran sub kegiatan adalah Tersedianya Dokumen data base angkutan umum dan Dokumen Evaluasi Jaringan angkutan umum

dalam trayek dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah dokumen data base angkutan umum dan hasil yang dicapai adalah Tersedianya dokumen data base angkutan umum dan dokumen evaluasi jaringan angkutan umum dalam trayek;

**2.8 Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 150.000.000 dengan realisasi Rp. 149.413.100 atau sebesar 99,60%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :**

2.8.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ mendapatkan anggaran sebesar Rp. 50.000.000 dengan realisasi Rp. 49.759.300 atau sebesar 99,51%. sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan dan hasil yang dicapai adalah Terlaksananya sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan;

2.8.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasi Rp. 99.653.800 atau sebesar 99,65%. sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya Frekuensi SMK ke Pengusaha Angkutan dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah frekuensi SMK ke pengusaha angkutan;

**3. Program Pengelolaan Pelayaran mendapatkan anggaran sebesar Rp. 150.000.000 dengan realisasi Rp. 144.446.000 atau sebesar 96,29%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :**

**3.1 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan**

**Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran sebesar Rp. 150.000.000 dengan realisasi Rp. 144.446.000 atau sebesar 96,29%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :**

3.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran sebesar Rp. 150.000.000 dengan realisasi Rp. 144.446.000 atau sebesar 96,29%, hal ini disebabkan adanya keterbatasan mobilitas yang diakibatkan oleh dampak pandemi covid 19. sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya Kapal layar <7GT yang layak operasi, lokasi Operasional Kapal <7GT dan peralatan keselamatan perhubungan laut dan ASDP dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah kapal layar <7GT yang layak operasi dan hasil yang dicapai adalah Terawasnya kapal layar <7GT dan tersedianya peralatan keselamatan perhubungan laut dan ASDP;

Realisasi program kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut dibawah ini :

Tabel 2.1  
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2022  
 Dinas Perhubungan Kabupaten Garut

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.09.	Wajib									
5.1.2.09.01.	Perhubungan									
2.15.2.15.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perlengkapan jalan  Persentase ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU)  Persentase peningkatan Pelayanan Angkutan umum Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas Persentase Sosialisasi keselamatan perhubungan	48.227.200.000	3.738.351.300	6.241.507.700	6.152.749.430	99,09	3.758.443.194	13.649.543.924	28,30

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>2.15.2.15.01.02.04.</b>	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>									
2.15.2.15.01.02.04.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian parkir umum	500.000.000	47.400.000	100.000.000	99.720.900	99,72	50.000.000	197.120.900	39,42
<b>2.15.2.15.01.02.05.</b>	<b>Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>									
2.15.2.15.01.02.05.07.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang di pelihara	800.000.000	100.000.000	200.000.000	199.999.900	100,00	200.000.000	499.999.900	62,50
2.15.2.15.01.02.05.04.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kelengkapan Uji (Buku/Kartu Uji dan Stiker Uji)	1.500.000.000	348.905.000	270.602.700	267.048.000	98,69	199.477.400	815.430.400	54,36

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.15.2.15.01.02.05.01.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Integrasi aplikasi pengujian ke Website Dinas Perhubungan, Jumlah alat uji, Upgrade sistem informasi pelayanan jasa perhubungan	700.300.000	50.000.000	200.300.000	197.099.900	98,40	-	247.099.900	35,28
<b>2.15.2.15.01.02.02.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota</b>									
2.15.2.15.01.02.02.04.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah meteran listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang, Jumlah PJU yang terpelihara	12.850.000.000	568.020.000	1.462.900.000	1.452.524.750	99,29	1.333.887.000	3.354.431.750	26,10
2.15.2.15.01.02.02.02.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah PJU yang terbangun	19.500.000.000	496.580.000	1.537.100.000	1.530.980.300	99,60	566.900.000	2.594.460.300	13,30
<b>2.15.2.15.01.02.10.</b>	<b>Kegiatan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>									

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.15.2.15.01.02.10.02.	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan tidak bermotor yang terkendali	510.000.000	50.240.000	20.000.000	19.999.800	100,00	63.709.000	133.948.800	26,26
<b>2.15.2.15.01.02.12.</b>	<b>Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>									
2.15.2.15.01.02.12.01.	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi jaringan angkutan umum dalam trayek	650.000.000	295.470.000	140.000.000	136.225.000	97,30	-	431.695.000	66,41
<b>2.15.2.15.01.02.09.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>									

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.15.2.15.01.02.09.02.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data base angkutan barang, Jumlah Shelter/halte angkutan umum, Jumlah peserta temu wicara, Jumlah sopir/ juru mudik/ awak kendaraan angkutan umum	1.311.000.000	77.900.000	290.000.000	264.106.100	91,07	50.128.000	392.134.100	29,91
<b>2.15.2.15.01.02.06.</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>									
2.15.2.15.01.02.06.01.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya, Jumlah wilayah pengamanan angkutan hari raya, natal dan tahun baru.	3.986.000.000	650.985.000	1.066.000.000	1.053.787.000	98,85	918.115.980	2.622.887.980	65,80
2.15.2.15.01.02.06.02.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah rambu - rambu lalu lintas, Panjang marka yang terpasang, Jumlah alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) yang terpasang	3.923.900.000	772.941.300	754.605.000	732.546.180	97,08	304.440.000	1.809.927.480	46,13

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.15.2.15.01.02.06.03.	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penunjang lalu lintas	926.000.000	279.910.000	50.000.000	49.298.500	98,60	-	329.208.500	35,55
<b>2.15.2.15.01.02.08.</b>	<b>Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>									
2.15.2.15.01.02.08.01.	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan	670.000.000		50.000.000	49.759.300	99,52	50.000.000	99.759.300	14,89
2.15.2.15.01.02.08.04.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi SMK ke pengusaha angkutan	400.000.000		100.000.000	99.653.800	99,65	21.785.814	121.439.614	30,36
<b>2.15.2.15.01.03.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>Persentase sarana pelayaran yang laik layar</b>	<b>600.000.000</b>	<b>54.885.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>144.446.000</b>	<b>96,30</b>	<b>59.825.640</b>	<b>259.156.640</b>	<b>43,19</b>

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.15.2.15.01.03.02.	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota									
2.15.2.15.01.03.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kapal layar <7GT yang layak operasi, Jumlah lokasi operasional kapal <7GT, Jumlah peralatan keselamatan perhubungan laut dan ASDP	600.000.000	54.885.000	150.000.000	144.446.000	96,30	59.825.640	259.156.640	43,19
2.15.2.15.01.01.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi</b>	<b>219.635.180.500</b>	<b>23.824.194.368</b>	<b>40.434.744.880</b>	<b>37.237.895.727</b>	<b>92,09</b>	<b>40.636.870.479</b>	<b>101.698.960.574</b>	<b>46,30</b>
2.15.2.15.01.01.01.	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>									
2.15.2.15.01.01.01.01.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan	92.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	100,00	174.998.800	209.998.800	227,03
2.15.2.15.01.01.02.	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.15.2.15.01.01.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana yang di butuhkan jumlah PNS Dinas Perhubungan	59.760.000.000	1.155.245.000	14.853.127.754	13.039.082.161	87,79	15.038.395.629	29.232.722.790	48,92
2.15.2.15.01.01.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai Non PNS (TKK dan TKS)	10.735.600.000	1.949.500.000	1.949.500.000	1.946.840.000	99,86	1.934.990.000	5.831.330.000	54,32
<b>2.15.2.15.01.01.06.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									
2.15.2.15.01.01.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen peralatan listrik	90.000.000	25.000.000	17.500.000	17.500.000	100,00	20.000.000	62.500.000	69,44
2.15.2.15.01.01.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK, peralatan dan perlengkapan kantor	1.183.572.200	75.256.000	212.572.200	211.592.000	99,54	50.715.800	337.563.800	28,52
2.15.2.15.01.01.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	458.371.000	100.584.400	53.371.000	53.371.000	100,00	115.915.500	269.870.900	58,88
2.15.2.15.01.01.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah koran dan majalah	37.000.000	10.000.000	7.000.000	1.100.000	15,71	10.000.000	21.100.000	57,03
2.15.2.15.01.01.06.08.	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah makan minum pegawai dan tamu	206.286.000	23.824.200	21.286.000	21.275.500	99,95	70.000.000	115.099.700	55,80
2.15.2.15.01.01.06.09.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	927.470.500	165.279.000	197.470.500	178.855.340	90,57	137.641.000	481.775.340	51,95
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas Interior ruangan kantor	120.000.000		200.000.000	198.742.000	99,37	-	198.742.000	165,62
<b>2.15.2.15.01.01.08.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									
2.15.2.15.01.01.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran tagihan listrik	95.400.000.000	20.171.005.768	22.421.611.626	21.080.166.505	94,02	23.000.000.000	64.251.172.273	67,35
2.15.2.15.01.01.08.04.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah peralatan kebersihan	49.233.688.800	50.000.000	108.113.800	107.989.550	99,89	16.283.000	174.272.550	0,35
<b>2.15.2.15.01.01.09.</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									
2.15.2.15.01.01.09.02.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional	540.692.000	81.000.000	125.692.000	114.722.971	91,27	67.930.750	263.653.721	48,76
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	Luas ruangan kantor dinas yang dipelihara	850.000.000		250.000.000	249.158.700	99,66	-	249.158.700	29,31

Dari uraian realisasi program kegiatan tersebut diatas apabila di ukur dari realisasi kinerja, seluruh program kegiatan mencapai target sesuai yang diharapkan. Hanya ada satu sub kegiatan yang tidak diserap yaitu : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disebabkan pada tahun 2021 akibat dampak covid 19 bahan bacaan diperoleh secara *online* karena adanya keterbatasan interaksi antara penyedia majalah/ koran dengan aparaturnya Dinas Perhubungan.

Adapun faktor – faktor terpenuhinya target kinerja adalah :

1. Melakukan efisiensi kegiatan untuk efektivitas terhadap pegawai serta memaksimalkan segala kemampuan sumber daya yang ada;
2. Menganggarkan kembali dana untuk pengadaan sarana prasarana perhubungan yang dirasa belum optimal pada anggaran Perubahan tahun berjalan;
3. Melakukan evaluasi secara berkala dan intensif guna mendorong percepatan pelaksanaan program kegiatan;
4. Mendorong semua unsur pegawai Dinas Perhubungan untuk terlibat secara menyeluruh sesuai dengan tugas, fungsi dan kemampuannya masing-masing;

Implikasi yang timbul terhadap capaian program renstra dengan tercapainya target kinerja program kegiatan tahun anggaran 2021 adalah :

1. Capaian target Renstra meningkat secara signifikan;
2. Memudahkan proses evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan tahun berjalan dan tahun berikutnya;
3. Lebih mudah dalam menerapkan skala prioritas terhadap program kegiatan agar pembangunan dari sektor perhubungan lebih merata.

Atas dasar uraian diatas, maka Dinas Perhubungan mengambil kebijakan/ tindakan yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya adalah :

1. Menjaga konsistensi capaian target kinerja tahun sebelumnya agar lebih meningkat pada tahun berikutnya;
2. Melengkapi perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas dengan menggunakan skala prioritas seperti rambu, marka, pengaman jalan dan RPPJ, sehingga diharapkan dapat mendukung kelancaran, ketertiban, keamanan serta pengawasan pergerakan lalu lintas;
3. Melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta dalam upaya peningkatan retribusi dari sektor perhubungan seperti dalam pengelolaan parkir;
4. Mengupayakan peningkatan belanja pada sektor pemeliharaan sarana prasarana perhubungan dan fasilitas perlengkapan jalan yang telah tersedia agar tetap terjaga kondisinya;
5. Meningkatkan pelayanan dalam hal perijinan dengan cara penyederhanaan birokrasi dan transparansi;
6. Penegakan Peraturan dibidang lalu lintas dan angkutan serta sanksi bagi yang merusak fasilitas lalu lintas;
7. Melaksanakan upaya penegakkan hukum terhadap pemakai jalan baik dalam bentuk preventif maupun represif;
8. Memprioritaskan pengadaan perlengkapan dan sarana pelayanan publik;
9. Melayani keluhan masyarakat melalui media sosial terutama yang berkaitan dengan PJU dan perlengkapan jalan lainnya;
10. Terus menerus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk mencari solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang ada.

## **2.2 Analisis kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2021**

Analisis kinerja pelayanan tahun 2021 meliputi Target dan capaian kinerja sasaran RPJMD Dinas Perhubungan Tahun 2021 yang merupakan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2021 serta implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Adapun hasil analisis yang diperoleh tergambar dalam uraian sebagaimana berikut dibawah ini :

### 2.2.1 Capaian kinerja RPJMD

Target dan capaian kinerja sasaran RPJMD Dinas Perhubungan Tahun 2021 merupakan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Garut. Adapun hasil yang dapat dicapai sebagaimana tersaji dalam tabel berikut dibawah ini :

**Tabel 2. 2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan**  
**Kabupaten Garut Tahun 2021**

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>2.09. PERHUBUNGAN</b>											
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum		%	0,3909	144.284	158.712	174.584	0,4368		158.712	174.584	
2	Rasio Ijin Trayek		%	0,061	0,083	0,084	0,085	0,061		0,084	0,085	
3	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum		Unit	13307	13.706	14.117	14.541	8.662		14.117	14.541	
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		Lokasi	3	3	3	3	3	3	3	3	
5	Persentase Layanan Angkutan Darat		%	0,3909	0,0809	0,0847	0,0888	0,4368		0,0847	0,0888	
6	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum		%	9,06	7,91	6,92	6,04	18,07		6,92	6,04	
7	Pemasangan Rambu-Rambu		%	87	88	89	90	158	156	89	90	
8	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan		kend /Km	0.062	0,060	0,059	0,057	0,062		0,059	0,057	
9	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum		Org	6.384.856	1.783.860	1.873.053	1.966.706	501.224		1.873.053	1.966.706	
10	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandar/Terminal Per Tahun		Org/Thn	6.384.856	1.783.860	1.873.053	1.966.706	501.224		1.873.053	1.966.706	

Dari tabel 2.1 diatas maka dapat disimpulkan bahwa dari 10 indikator IKK yang diukur 8 indikator mencapai target dan ada yang melebihi dari target yang telah ditetapkan, sementara 4

indikator IKK lainnya tidak mencapai target. Apabila dibandingkan dengan capaian atau realisasi IKK pada tahun sebelumnya, pada tahun anggaran 2021 mengalami Kenaikan. Adapun untuk Indikator yang tidak mencapai target disebabkan karena :

1. Disebabkan karena adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan menurunnya perekonomian dan hal ini berimbas terhadap sektor transportasi (menurunnya pengguna jasa angkutan umum);
2. Adanya efisiensi anggaran terhadap pembangunan fisik/ bangunan dalam hal ini pembangunan terminal type C;
3. Terjadinya kerusakan prasarana alat uji kendaraan bermotor yang menyebabkan terhentinya pelayanan pengujian kendaraan bermotor di unit pelayanan Dinas Perhubungan Kab. Garut dalam kurun waktu yang cukup lama (3 bulan);
4. Adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Garut untuk mengalihkan sebagian anggaran untuk penanganan dampak pandemi Covid 19.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk mengatasi permasalahan yang ada terutama yang berkaitan dengan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang terhenti. Adapun langkah – langkah yang dilakukan antara lain :

1. Mengeluarkan surat rekomendasi pengujian kendaraan bermotor wajib uji di luar wilayah Kabupaten Garut agar masyarakat pengguna jasa pengujian kendaraan bermotor tetap bisa melakukan uji kendaraannya;
2. Menginventarisir kembali sarana prasarana yang tidak bisa di sediakan pada tahun anggaran 2020 agar bisa kembali di ajukan pada tahun anggaran selanjutnya;
3. Mengoptimalkan seluruh jajaran Dinas Perhubungan untuk melakukan koordinasi serta pengawasan terhadap kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan capaian IKK Dinas Perhubungan agar pada pelaksanaan tahun selanjutnya realisasi dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

### 3.1.1 Ringkasan Kinerja Pencapaian Sasaran Renstra Dinas

#### Perhubungan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran dengan 5 (Lima) indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja perubahan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut tahun 2021 diperoleh data – data sebagaimana tersaji dalam tabel berikut dibawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Kinerja Pencapaian Renstra 2019-2024**

NO	INDIKATOR KINERJA	HASIL TAHUN 2020	HASIL TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN 2020 THD TARGET (%)	TERCAPAI / TIDAK **)	HASIL SAMPAI DENGAN 2021	TARGET AKHIR RENSTRA
1	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan (%)	29,59	68,29 %	68,29%	100%	√	68,29%	97,22%
2	Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (%)	32,50	62,05 %	62,05%	100%	√	62,05%	99,12%
3	Tingkat ketersediaan angkutan umum yang beroperasi (%)	27,92	50,06 %	50,06%	100%	√	50,06%	97,92%
4	Tingkat penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan (%)	49,32	52,09 %	52,09%	100%	√	52,09%	100%
4.	Tingkat Laik Layar Sarana Pelayaran	n/a	83,33 %	83,33%			83,33%	100%

**Ket :** √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, Δ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan.

#### 3.1.1.1 Rincian Kinerja

Capaian kinerja pada tahun anggaran 2021 yang diukur berdasarkan perubahan perjanjian kinerja Kepala Dinas

Perhubungan Tahun 2021 meliputi 2 (dua) sasaran dan 4 (Empat) indikator. Dari 4 (Empat) indikator tersebut semuanya mencapai target sesuai dengan yang telah direncanakan.

Berikut uraian rincian kinerja berdasarkan sasaran yang ingin dicapai pada tahun anggaran 2021, sebagai berikut :

1) **Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana Perhubungan dan fasilitas perlengkapan jalan.**

Sasaran Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana Perhubungan dan fasilitas perlengkapan jalan memiliki 2 (dua) indikator dengan deskripsi penjelasan capaian sebagai berikut :

1. Capaian indikator Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan adalah 68,29% dari target sebesar 68,29% atau dengan persentase capaian sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena : *adanya pengalihan anggaran terhadap program kegiatan prioritas mengingat adanya efisiensi anggaran berkenaan dengan penanganan pandemi Covid 19. Tidak lupa pula melakukan pengawasan yang cukup ketat kepada kuasa pengguna anggaran agar dalam pelaksanaan program kegiatan lebih memprioritaskan kebutuhan yang berkaitan dengan pengadaan sarana prasarana perhubungan, sehingga arah kebijakan sebagaimana yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana.*
2. Indikator Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan capaian kinerja sebesar 62,05% dari target 62,05% dengan persentase capaian sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena : *Penyediaan perlengkapan jalan berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan prioritas pemerintah Kabupaten Garut yang kewenangannya ada di Dinas Perhubungan, sehingga dalam proses pengadaan benar – benar diawasi mulai dari tahap penganggaran sampai dengan pelaksanaan pekerjaan. Selain itu berkenaan dengan pengadaan rambu – rambu lalu lintas ada prioritas terutama pada pengadaan rambu papan nama jalan untuk jalan baru yang ada di Kabupaten Garut.*

2) **Meningkatnya Pelayanan Angkutan dan Sosialisasi/ Penyuluhan Keselamatan Perhubungan**

1. Tingkat ketersediaan angkutan umum yang beroperasi

berhasil mencapai target sebesar 50,06% dari target 50,06% dengan persentase capaian sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena : *ketersediaan angkutan umum tidak mengalami perubahan signifikan, sehingga upaya dinas perhubungan dalam meningkatkan ketersediaan angkutan umum yang beroperasi tidak mengalami kendala yang cukup berarti.*

2. Tingkat penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan target 52,09% dengan realisasi 52,09% atau persentase capaian sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena : *adanya kebijakan dan inisiatif dari jajaran pimpinan dinas Perhubungan untuk mengalihkan kegiatan yang sedianya berfokus terhadap pengumpulan masa menjadi kegiatan yang bersifat penyediaan barang yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas, sehingga secara tidak langsung tidak mengurangi substansi program keselamatan perhubungan. Selain itu ada kebijakan sosialisasi dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom.*
3. Tingkat laik layar sarana pelayaran memiliki target sebesar 83,33% dengan realisasi sebesar 83,33% atau dengan persentase capaian sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena : *untuk sarana pelayaran sudah tersedia data yang akurat mengenai jumlah serta lokasi yang cukup akurat sehingga memudahkan dalam proses pelaksanaan kegiatan.*

### **2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Sementara itu isu strategis Dinas Perhubungan berkenaan dengan penyusunan program kegiatan tahun 2023 adalah :

- a. Belum meratanya pemenuhan kebutuhan dan pembangunan prasarana dan fasilitas transportasi;
- b. Belum optimalnya pengelolaan sistem angkutan umum yang terpadu dan berkelanjutan;
- c. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan IPTEK dalam penyelenggaraan Transportasi;

- d. Masih rendahnya pemahaman dan pengelolaan keselamatan lalu lintas.

Apabila dikaitkan dengan Visi Misi kepala Daerah, Dinas Perhubungan masuk ke dalam misi 3 yaitu Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang dengan tujuan Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar secara merata yang mampu mendorong percepatan ekonomi, sosial dan budaya. Indikator tujuannya adalah Indeks daya saing infrastruktur (%). Salah satu faktor penunjang daya saing infrastruktur ada di Dinas Perhubungan berupa penyediaan sarana prasarana perhubungan dan fasilitas perlengkapan jalan. Artinya ada keselarasan antara misi kepala daerah dengan program kerja Dinas Perhubungan. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa bila program kerja Dinas Perhubungan tidak terealisasi maka secara langsung akan menghambat atau berpengaruh terhadap pencapaian misi Kepala Daerah.

Kaitan dengan catatan strategis Kinerja Dinas Perhubungan yang terkait dengan ruang publik, seperti Penertiban Terminal tidak untuk pasar dan munculnya pungutan liar, di sisi lain penertiban ini akan berdampak pada PAD telah ditindak lanjuti oleh jajaran Dinas Perhubungan antara lain :

- a. Pasar merupakan salah satu tarikan perjalanan yang cukup besar bagi operator angkutan umum sehingga lokasi terminal di beberapa kota termasuk di Kabupaten Garut berdampingan dengan Pasar. Namun dengan bertambahnya pedagang menjadikan kapasitas pasar tidak dapat menampung penambahan jumlah pedagang tersebut, sehingga pedagang merambah ke lahan terminal yang berada disekitarnya. Dinas Perhubungan telah menyusun perencanaan pembangunan Terminal dengan mengedepankan fungsi terminal sebagai pelayanan terhadap moda angkutan dan memisahkan kegiatan terminal dengan aktivitas perekonomian. Namun dengan keterbatasan anggaran, pembangunan belum dapat terealisasi karena lahan yang ada sudah tidak mampu menampung perkembangan saat ini.

- b. Berkenaan dengan penertiban pungutan, Dinas Perhubungan telah melakukan pemungutan retribusi terminal telah dilakukan pemungutan sesuai dengan peruntukan dan tempat pemungutan, dimana pungutan retribusi terminal hanya dipungut di dalam areal terminal sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Potensi pendapatan yang ada saat ini belum optimal dikarenakan keterbatasan terminal sehingga pemungutan retribusi hanya dapat dilakukan di beberapa lokasi terminal yang dilayani trayek angkutan umum. Namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin meskipun terdapat kendala sulitnya sirkulasi kendaraan yang akan masuk atau keluar terminal karena keberadaan pedagang yang sudah merambah akses masuk/keluar di sekitar terminal.
- d. Namun demikian Dinas Perhubungan tetap berupaya melakukan langkah-langkah koordinasi dan penempatan petugas dalam memberikan pengaturan lalu lintas dan angkutan di sekitar lokasi pasar dan mengarahkan angkutan umum untuk memasuki terminal.
- e. Untuk Tahun Anggaran 2023 berkenaan dengan pungutan retribusi PAD agar terorganisir dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada akan dilakukan inovasi dalam bentuk kerjasama dengan pihak swasta dalam penataan potensi parkir di wilayah Kabupaten Garut.

Dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi, catatan strategis dan permasalahan di lapangan maka diperoleh rumusan untuk rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah dengan memprioritaskan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana perhubungan serta peningkatan pelayanan angkutan dan keselamatan perhubungan.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Untuk menjaga keselarasan antara Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 dengan dengan dokumen perencanaan lainnya, maka dalam penyusunan rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan adalah membandingkannya dengan

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Garut tahun 2023.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan program kegiatan yang di ajukan dalam Rancangan Awal RKPD dengan program kegiatan yang ada di Rencana Kerja Dinas Perhubungan antara pagu Indikatif rancangan awal RKPD dengan kebutuhan dana yang diperlukan untuk rencana kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 telah sesuai.

Proses menyandingkan antara renja dengan RKPD penting dilakukan secara sistematis dan menyeluruh agar ada keselarasan antara program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan program kerja yang dilaksanakan oleh tingkat SKPD.

**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Garut**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERHUBUNGA N				77.460.584.540	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERHUBUNGA N				77.971.984.540
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				51.883.706.465	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				51.520.506.465

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>50.000.000</b>	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>50.000.000</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	25.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	12 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	25.000.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
		Realisasi Kinerja SKPD							
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>17.663.900.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>17.300.700.000</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	162 Orang/b u	14.980.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	162 Orang/b u	14.980.000.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	300 Dokumen	2.683.900.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	300 Dokumen	2.320.700.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>676.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>676.000.000</b>
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	318.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	318.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	170.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	170.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	76 Orang	138.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	76 Orang	138.000.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	56 Orang	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	56 Orang	50.000.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>500.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>500.000.000</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	25.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	25.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	85.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	85.000.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1200 Paket	45.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1200 Paket	45.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	125.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	125.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	413 Dokumen	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	413 Dokumen	10.000.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2500 Laporan	210.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2500 Laporan	210.000.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>7.263.455.575</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>7.263.455.575</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	2.661.378.075	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	2.661.378.075
Pengadaan Mebel	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	100.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	100.000.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	200.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4.000.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4.000.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	302.077.500	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	302.077.500
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>25.024.035.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>25.024.035.000</b>

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24.035.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24.035.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>706.315.890</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>706.315.890</b>

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	77 Unit	140.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	77 Unit	140.000.000
Pemeliharaan Mebel	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	15.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	15.000.000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	3 Unit	551.315.890	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	3 Unit	551.315.890
<b>PROGRAM PENYELENGG ARAAN LALU</b>				<b>25.426.878.075</b>	<b>PROGRAM PENYELENGG ARAAN LALU</b>				<b>26.301.478.075</b>

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
<b>LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>					<b>LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>					
<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Ko ta</b>					<b>5.500.000.000</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Ko ta</b>				
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kot a	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Ko ta yang Tersedia	150 Unit	1.700.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kot a	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	150 Unit	1.700.000.000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	800 Unit	3.800.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	800 Unit	3.800.000.000	
<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>					<b>11.435.100.000</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>				

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Garut Samarang Samarang	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 Dokumen	80.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Garut Samarang Samarang	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 Dokumen	80.000.000
Pembangunan Gedung Terminal	Kab. Garut Cibatu Cibatu Kab. Garut Bl. Limbangan Limbangan Tengah	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	2 Unit	8.355.100.000	Pembangunan Gedung Terminal	Kab. Garut Cibatu Cibatu Kab. Garut Bl. Limbangan Limbangan Tengah	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	2 Unit	8.355.100.000
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung Kab. Garut Bayongbong Mulyasari	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1 Unit	3.000.000.000	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung Kab. Garut Bayongbong Mulyasari	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1 Unit	3.000.000.000
<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan</b>				<b>100.000.000</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan</b>				<b>100.000.000</b>

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
<b>Fasilitas Parkir</b>					<b>Fasilitas Parkir</b>				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut Garut Kota Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut Garut Kota Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	100.000.000
<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>				<b>4.843.778.075</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>				<b>4.843.778.075</b>
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang	3 Unit	4.218.778.075	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3 Unit	4.218.778.075

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
		Tersedia							
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Dokumen	375.000.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Dokumen	375.000.000
Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	12 Laporan	50.000.000	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	12 Laporan	50.000.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan	8 Unit	200.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang	8 Unit	200.000.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
Bermotor		Bermotor yang Terpelihara			Bermotor		Terpelihara		
<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>				<b>2.593.000.000</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>				<b>2.593.000.000</b>
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.057.000.000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.057.000.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	101 Unit	1.115.000.000	Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	101 Unit	1.115.000.000
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Garut Garut Kota Kota Kulon	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	296.000.000	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Garut Garut Kota Kota Kulon	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	296.000.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	125.000.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	125.000.000
<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>				<b>320.000.000</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>				<b>1.194.600.000</b>
Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Orang	220.000.000	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	27 Orang	583.200.000
Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi	12 Laporan	100.000.000	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi	12 Laporan	611.400.000

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		
<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>345.000.000</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>345.000.000</b>

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	345.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	345.000.000
<b>Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko</b>				<b>120.000.000</b>	<b>Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko</b>				<b>120.000.000</b>

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
ta					ta				
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	120.000.000	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	120.000.000
<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah</b>				<b>170.000.000</b>	<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah</b>				<b>170.000.000</b>

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
<b>Kabupaten/Kota</b>					<b>Kabupaten/Kota</b>				
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	170.000.000	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	170.000.000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>				<b>150.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>				<b>150.000.000</b>
<b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi</b>				<b>150.000.000</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi</b>				<b>150.000.000</b>

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
<b>pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Ko ta</b>					<b>Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Ko ta</b>				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut Pameungpeuk Pameungpeuk	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	150.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut Pameungpeuk Pameungpeuk	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	150.000.000
				<b>77.460.584.540</b>					<b>77.971.984.540</b>

Dari tabel tersebut diatas, Ada perbedaan atau selisih antara Rancangan awal RKPD. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pagu pada sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada awal perencanaan (Ranwal RKPD) sebesar Rp. 2.683.900.000 dan setelah di analisis menjadi Rp. 2.320.700.000. hal ini disebabkan karena untuk honorarium PJJ pengelolaannya di serahkan ke bidang Keselamatan lalu lintas, perkeretaapian dan pelayaran sebagai bidang yang membawahnya;
2. Pagu Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ pada awal perencanaan (Ranwal RKPD) sebesar Rp. 220.000.000 menjadi Rp. 583.200.000. hal disebabkan karena ada penambahan pagu untuk honorarium PJJ sebagaimana dijelaskan pada point 1.
3. Pagu Pelaksanaan Inspeksi Audit & Pemantauan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi pada awal perencanaan (Ranwal RKPD) sebesar Rp. 100.000.0000 menjadi 611.400.000. hal ini disebabkan karena setelah dianalisis ada kebutuhan yang sangat penting terkait pengadaan pos jaga PJJ di sepanjang jalur kereta api Garut – Cibatu, sehingga dipandang perlu untuk dianggarkan pada tahun 2023.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Berdasarkan hasil musrenbang kecamatan dan musrenbang Kabupaten ada beberapa kegiatan yang diusulkan untuk bahan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Kegiatan yang diusulkan tersebut yang mana merupakan bagian dari tufoksi serta wewenang Dinas Perhubungan selaku SKPD yang menerima usulan.

Menanggapi usulan tersebut, dinas perhubungan melakukan penyaringan dan memvalidasi usulan agar program kegiatan yang di usulkan sesuai dengan sasaran serta tufoksi Dinas Perhubungan.

Adapun program kegiatan yang diusulkan melalui kegiatan musrenbang tersebut sebagaimana tertuang dalam tabel berikut dibawah ini.

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Garut**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>Indikat or Kinerja</b>	<b>BESARAN/ VOLUME</b>	<b>CAT.</b>
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota/ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Sukaratu, Malangbong	Jumlah PJU yang terbangun	5 Unit	diteruskan
2		Sukaratu Malangbong		5 Unit	diteruskan
3		Karyasari Cibalong		5 Unit	diteruskan
4		Lembang Leks		5 Unit	diteruskan
5		Sindangsari Cisompet		5 Unit	diteruskan
6		Sindangsari Cisompet		5 Unit	diteruskan
7		Sindangsari Cisompet		5 Unit	diteruskan
8		Baru Dua Malangbong		5 Unit	diteruskan
9		Godog Karangpawitan		5 Unit	diteruskan
10		Cibatu Cibatu		5 Unit	diteruskan
11		Cigarong Cibalong		5 Unit	diteruskan
12		Sukasono Sukawening		5 Unit	diteruskan
13		Hegarsari Kadungora		5 Unit	diteruskan
14		Caringin Karangtengah		5 Unit	diteruskan
15		Kersamenak Tarogong Kidul		10 unit	diteruskan
16		Jatisari Karangpawitan		5 Unit	diteruskan
17		Linggarjati Pamulihan		10 unit	diteruskan

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>BESARAN/ VOLUME</b>	<b>CAT.</b>
18		PatarumanTarogong Kidul		5 Unit	diteruskan
19		KarangtengahKadungora		5 Unit	diteruskan
20		SukasonoSukawening		5 Unit	diteruskan
21		CintakaryaSamarang		5 Unit	diteruskan
22		BungbulangBungbulang		5 Unit	diteruskan
23		DawungsariCilawu		5 Unit	diteruskan
24		DayeuhmanggungCilawu		5 Unit	diteruskan
25		HegarmanahBungbulang		5 Unit	diteruskan
26		CikarangCisewu		5 Unit	diteruskan
27		CikarangCisewu		5 Unit	diteruskan
28		CiburialLeles		5 Unit	diteruskan
29		SukarajaBanuyuresmi		5 Unit	diteruskan
30		AwassagaraCikelet		5 Unit	diteruskan
31		LelesLeles		5 Unit	diteruskan
32		JayabayaMekarmukti		5 Unit	diteruskan
33		Sir nabaktiPameungpeuk		5 Unit	diteruskan
34		CilampuyangMalangbong		5 Unit	diteruskan
35		CibodasCikajang		5 Unit	diteruskan
36		PasirkiamisPasirwangi		5 Unit	diteruskan
37		SukaratuBanuyuresmi		5 Unit	diteruskan
38		MekarmuktiCilawu		5 Unit	diteruskan
39		SukahatiCilawu		5 Unit	diteruskan
40		KaryamuktiCibatu		5 Unit	diteruskan
41		KramatwangiCikajang		5 Unit	diteruskan

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>Indikat or Kinerja</b>	<b>BESARAN/ VOLUME</b>	<b>CAT.</b>
42		SukanagaraCisompet		5 Unit	diteruskan
43		DepokCisompet		5 Unit	diteruskan
44		KarangsariKarangpawitan		5 Unit	diteruskan
45		PadasukaPasirwangi		5 Unit	diteruskan

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa prioritas pembangunan Nasional yang ditetapkan pada tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 bahwa fokus pembangunan dititik beratkan terhadap peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Dengan kebijakan mengakomodasi usulan Musrenbangnas, peningkatan kualitas keselamatan dan pelayanan, mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, serta mendukung persiapan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Kebijakan sebagaimana tersebut diatas, ditindaklanjuti oleh Kementerian Perhubungan dengan menyiapkan kebijakan yang difokuskan untuk pembangunan pada proyek-proyek yang sedang berjalan (pemenuhan target RPJMN, *Major Project*, dan Direktif seperti: PSN, Perpres, dan Kegiatan Prioritas).

Sebagai tindak lanjut atas kebijakan Nasional, Dinas Perhubungan Kabupaten Garut memprioritaskan pembangunan berkaitan dengan reaktivasi jalur kereta api di wilayah Kabupaten Garut walaupun sampai dengan saat ini kewenangan sepenuhnya berada di Kementerian Perhubungan dalam hal ini pemerintah pusat. Andil Dinas Perhubungan Kabupaten Garut sendiri hanya berfokus terhadap penyediaan sarana prasarana keselamatan di sepanjang lintasan kereta api.

Berdasarkan undang undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, mneyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dalam hal ini RPJP nasional, RPJM nasional, renja pemerintah tingkat nasional, provinsi dan kabupaten disusun secara paralel atau ada keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Keselarsan antara RPJMN, RPJM provinsi dan RPJMD Kabupaten Garut harus menjadi landasan serta referensi bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja tahunan SKPD.

Untuk Tahun anggaran 2023 Dinas Perhubungan dalam konteks urusan perhubungan tidak masuk dalam program prioritas pemerintah pusat.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan**

Berdasarkan rumusan isu strategis pada bab II, yaitu dengan belum meratanya pemenuhan kebutuhan dan pembangunan prasarana dan fasilitas transportasi, Belum optimalnya pengelolaan sistem angkutan umum yang terpadu dan berkelanjutan serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan IPTEK dalam penyelenggaraan Transportasi serta masih rendahnya pemahaman dan pengelolaan keselamatan lalu lintas. Selain itu untuk menjaga keselarsan antara dokumen perencanaan, Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan implementasi atas sasaran target kinerja Renstra Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut tahun 2019-2024 untuk mendukung capaian Misi 3 Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 .

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 adalah : *“Meningkatnya Penyediaan Infrastuktur Dasar (Perhubungan) Dan Pelayanan Perhubungan Yang Merata Dan Berkualitas;*

Sedangkan sasaran Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Garut adalah :

- 1) Meningkatkan Aksesibilitas Dan Mobilitas Transportasi Dengan Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan Dan Fasilitas Perlengkapan Jalan;
- 2) Meningkatkan pelayanan angkutan umum, sosialisasi keselamatan perhubungan dan sarana pelayaran.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Satuan	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN
					2023
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Dasar (Perhubungan) Dan Pelayanan Perhubungan Yang Merata Dan Berkualitas		Tingkat ketersediaan sarana prasarana perhubungan, fasilitas perlengkapan jalan, angkutan umum yang beroperasi, penyuluhan keselamatan lalulintas dan angkutan dan laik layar sarana pelayaran	%	87,63
		Meningkatnya Aksesibilitas Dan Mobilitas Trasportasi Dengan Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan Dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	%	90,69
			Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	%	85,99
		Meningkatnya pelayanan angkutan umum, sosialisasi keselamatan perhubungan dan sarana pelayaran	Tingkat ketersediaan angkutan umum yang beroperasi	%	81,96
			Tingkat penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan	%	85,07
			Tingkat laik layar sarana pelayaran	%	94,44

### 3.2.1 Program dan Kegiatan

Dalam Perubahan RPJMD Kab. Garut tahun 2019-2024 dinas perhubungan termasuk kedalam misi 3 yaitu Mewujudkan

pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang dengan sasaran Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian.

Apabila dikaitkan dengan aspek pelayanan umum urusan perhubungan (IKK urusan perhubungan) penyediaan sarana prasarana merupakan faktor yang berpengaruh terhadap capaian kinerja IKK urusan perhubungan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka dalam rangka mewujudkan visi misi kepala daerah, Dinas perhubungan dalam menetapkan program kegiatannya berusaha untuk menyelaraskannya dengan RPJMD Perubahan serta Renstra Perubahan dimana fokus pembangunan berada pada penyediaan sarana prasarana perhubungan dan fasilitas perlengkapan jalan yang memadai, karena di beberapa wilayah kerja Dinas Perhubungan masih banyak fasilitas serta sarana prasarana yang belum memadai bahkan ada beberapa wilayah yang masih kurang sarana prasarana penunjang operasionalnya.

Adapun faktor utama yang dijadikan landasan dalam penyusunan program/ kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut adalah sebagai upaya dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Garut yang tertuang dalam Visi dan Misi Kepala Daerah seperti :

- a. Pencapaian misi 3 yaitu Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang melalui peningkatan Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian dengan menyediakan infrastruktur dasar perhubungan dan pelayanan perhubungan yang merata dan berkualitas;
- b. Untuk pencapaian SDGs, Dinas Perhubungan berperan secara tidak langsung dalam 17 tujuan SDGs seperti dalam penanganan perubahan iklim dimana Dinas Perhubungan memiliki pelayanan yang berkaitan dengan uji emisi kendaraan bermotor;

- c. Untuk pengentasan kemiskinan Dinas Perhubungan berupaya menyediakan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas transportasi ke wilayah terpencil;
- d. Dalam pendayagunaan potensi ekonomi daerah Dinas Perhubungan berupaya meningkatkan penyediaan sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat seperti pelayanan pengujian kendaraan bermotor, potensi parkir dan terminal dll.

Adapun program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 meliputi tiga program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah;
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);

Indikator Program :

- 1) Persentase ketersediaan sarana prasarana perhubungan;
  - 2) Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas;
  - 3) Persentase ketersediaan penerangan jalan umum (PJU);
  - 4) Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum;
  - 5) persentase sosialisasi keselamatan perhubungan.
3. Program Pegelolaan Pelayanan;

Indikator Program :

- 1) Persentase sarana pelayanan yang laik layar.

Berdasarkan pagu validasi Renja 2023 yang telah di *input* ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara keseluruhan anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 77.971.984.540,- yang keseluruhannya bersumber dari APBD Kabupaten Garut T.A 2023.

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

**4.1 Rencana Kerja**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa rencana kerja Dinas Perhubungan difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perhubungan dan fasilitas perlengkapan jalan serta peningkatan pelayanan angkutan umum berikut sosialisasi keselamatan perhubungan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa sektor Transportasi saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat seiring dengan berkembangnya pusat – pusat perekonomian di Kabupaten Garut akan tetapi hal tersebut belum diimbangi dengan keberadaan sarana prasarana dan fasilitas perlengkapan jalan yang memadai. Disamping itu ada hal penting pula yaitu sebagai penyelarasan dengan dokumen – dokumen perencanaan di tingkat yang lebih tinggi.

Rencana kerja Dinas Perhubungan disusun berpedoman pada Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023 merupakan implementasi atas Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam Peraturan tersebut diatas mengisaratkan bahwa seluruh program kegiatan/ sub kegiatan di input ke aplikasi berbasis elektronik yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri yang prosesnya melewati beberapa tahapan yaitu :

1. Persiapan
2. Rancangan Awal
3. Rancangan
4. Musrenbang
5. Rancangan Akhir

## 6. Penetapan.

Dari segi pendanaan anggaran program kegiatan yang direncanakan untuk tahun anggaran 2023 berasal dari APBD Kabupaten Garut.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023  
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Dinas Perhubungan Kabupaten Garut

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							77.971.984.540				78.829.313.075		
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							51.520.506.465				50.760.935.000		
2	15	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							50.000.000				50.000.000		
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyusunan Dokumen penganggaran evaluasi kinerja	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung	100 %	7 Dokumen	12 Laporan	25.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	25.000.000
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan penyusunan Dokumen penganggaran evaluasi kinerja	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung	100 %	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	25.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	1	0	2.0		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											<b>17.300.700.000</b>		<b>17.663.900.000</b>
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji tunjangan jasa tenaga perhubungan dan tenaga administrasi	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggu ng	100 %	162 Orang/b u	144n31 orang	14.980.000.000	Dana Transfe r Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	14.980.000.000
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji tunjangan jasa tenaga perhubungan dan tenaga administrasi	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggu ng	100 %	2 Dokumen	431 orang	2.320.700.000	Dana Transfe r Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	2.683.900.000
2	1	0	2.0		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>											<b>676.000.000</b>		<b>713.000.000</b>
2	1	0	2.0	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah ASN Dinas Perhubungan Kab. Garut yang dibina	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggu ng	100 %	3 Paket	431 orang	318.000.000	Dana Transfe r Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	350.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	1	0	2.0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN Dinas Perhubungan Kab. Garut yang dibina	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	100 %	10 Orang	431 orang	170.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	170.000.000	
2	1	0	2.0	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Dinas Perhubungan Kab. Garut yang dibina	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	100 %	300 Orang	431 orang	138.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	138.000.000	
2	1	0	2.0	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Dinas Perhubungan Kab. Garut yang dibina	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	100 %	75 Orang	431 orang	50.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	55.000.000	
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2.0</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>500.000.000</b>				<b>515.000.000</b>	
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	100 %	20 Paket	12 Laporan	25.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	25.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggu ng	100 %	1 Paket	12 Laporan	85.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	100.000.000	
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggu ng	100 %	1200 Paket	12 Laporan	45.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	45.000.000	
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggu ng	100 %	2 Paket	12 Laporan	125.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	125.000.000	
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggu ng	100 %	1 Dokumen	12 Laporan	10.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	10.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	1	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung	100 %	2 Laporan	12 Laporan	210.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	210.000.000	
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2.0</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>7.263.455.575</b>		<b>6.340.000.000</b>			
2	1	0	2.0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung	100 %	35 Unit	78 unit	2.661.378.075	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	1.140.000.000	
2	1	0	2.0	0	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung	100 %	150 Unit	78 unit	100.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	100.000.000	
2	1	0	2.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung	100 %	18 Unit	78 unit	200.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	250.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	1	0	2.0	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung	100 %	1 Unit	78 unit	4.000.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	4.500.000.000	
2	1	0	2.0	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung	100 %	109 Unit	78 unit	302.077.500	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	350.000.000	
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2.0</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>25.024.035.000</b>				<b>25.024.035.000</b>		
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung	100 %	12 Laporan	24 Laporan	25.000.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	25.000.000.000	
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung	100 %	12 Laporan	24 Laporan	24.035.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	24.035.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target						
2	1	0	2.0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												<b>455.000.000</b>		
	5	1	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	100 %	79 Unit	130 Unit	140.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	140.000.000
2	1	0	2.0	0	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	100 %	50 Unit	130 Unit	15.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	15.000.000
2	1	0	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	100 %	1 Unit	130 Unit	551.315.890	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	300.000.000
2	1	0			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>									<b>26.301.478.075</b>			<b>27.918.378.075</b>	
2	1	0	2.0		<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>									<b>5.500.000.000</b>				<b>5.800.000.000</b>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah PJU yang terbangun dan terpelihara	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggu ng	854,00 %	150 Unit	950 Unit	1.700.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	854,00 %	1.800.000.000	
2	1	0	2.0	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Persentase ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah PJU yang terbangun dan terpelihara	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggu ng	854,00 %	800 Unit	950 Unit	3.800.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	854,00 %	4.000.000.000	
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2.0</b>	<b>3</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>								<b>11.435.100.000</b>			<b>12.588.000.000</b>		
2	1	0	2.0	0	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Jumlah Laporan pengelolaan terminal penumpang type C	Kab. Garut Samarang Samarang	9069,00 %	1 Dokumen	12 Laporan	80.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	9069,00 %	88.000.000	
2	1	0	2.0	0	Pembangunan Gedung Terminal	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Jumlah Laporan pengelolaan terminal penumpang type C	Kab. Garut Cibatu Kab. Garut Bl. Limbangan Limbangan Tengah	9069,00 %	2 Unit	12 Laporan	8.355.100.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	9069,00 %	9.000.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	1	0	2.0	0	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Jumlah Laporan pengelolaan terminal penumpang type C	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung Kab. Garut Bayongbong Mulyasari	9069,00 %	1 Unit	12 Laporan	3.000.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	9069,00 %	3.500.000.000	
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2.0</b>		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>										<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>	
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Garut Garut Kota Semua Kelurahan	9069,00 %	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	9069,00 %	100.000.000	
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2.0</b>		<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>										<b>4.843.778.075</b>		<b>4.898.778.075</b>	
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Jumlah laporan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung	9069,00 %	3 Unit	12 Laporan	4.218.778.075	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	9069,00 %	4.218.778.075	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
21502054	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	9069,00 %	12 Dokumen	12 Laporan	375.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	9069,00 %	375.000.000
21502056	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah laporan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	9069,00 %	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	9069,00 %	55.000.000
21502057	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah laporan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	9069,00 %	8 Unit	12 Laporan	200.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan	9069,00 %	250.000.000
<b>2150206</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>								<b>2.593.000.000</b>			<b>2.682.000.000</b>		
21502061	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung	8658,00 %	12 Laporan	12 Laporan	1.057.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	8658,00 %	1.057.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.06	02	Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	Jumlah Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah laporan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggu	8658,00 %	101 Unit	12 Laporan	1.115.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	8658,00 %	1.200.000.000	
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Kab. Garut Garut Kota Kulon	8658,00 %	1 Dokumen	12 Laporan	296.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	8658,00 %	300.000.000	
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggu	8658,00 %	4 Laporan	12 Laporan	125.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	8658,00 %	125.000.000	
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.08</b>		<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>							<b>1.194.600.000</b>				<b>1.194.600.000</b>		
2	15	02	2.08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Persentase sosialisasi keselamatan perhubungan	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggu	8507,00 %	27 Orang	12 Laporan	583.200.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase sosialisasi keselamatan perhubungan	8507,00 %	583.200.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	1	0	2.0	0	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Persentase sosialisasi keselamatan perhubungan	Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung	8507,00 %	12 Laporan	12 Laporan	611.400.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase sosialisasi keselamatan perhubungan	8507,00 %	611.400.000	
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2.0</b>		<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>345.000.000</b>			<b>350.000.000</b>			
2	1	0	2.0	0	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyediaan angkutan umum orang dan barang	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung	8196,00 %	12 Laporan	12 Laporan	345.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum	8196,00 %	350.000.000	
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2.1</b>		<b>Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>120.000.000</b>			<b>125.000.000</b>			
2	1	0	2.1	0	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung	8196,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum	8196,00 %	125.000.000	
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2.1</b>		<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>170.000.000</b>			<b>180.000.000</b>			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	1	0	2.1	0	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan	Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung	8196,00 %	2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum	8196,00 %	180.000.000	
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>						<b>150.000.000</b>				<b>150.000.000</b>			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2.0</b>		<b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>150.000.000</b>				<b>150.000.000</b>			
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase laik layar sarana pelayaran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan keselamatan angkutan laut	Kab. Garut Pameungpeuk Pameungpeuk	9444,00 %	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase laik layar sarana pelayaran	9444,00 %	150.000.000	
<b>TOTAL</b>										<b>77.971.984.5</b>							<b>78.829.313.0</b>	
										<b>40</b>							<b>75</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan rencana kebutuhan maka Dinas Perhubungan mengambil kebijakan :

- a. menunda kegiatan yang tidak terlalu mendesak untuk direncanakan kembali pada tahun selanjutnya;
- b. berupaya mengajukan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi serta pusat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang sangat penting seperti pembangunan terminal type C;
- c. berinovasi untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Tahun 2023 ini disusun melalui tahapan serta proses yang terukur sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan baik dalam proses penyusunannya maupun dalam proses memasukan data di Aplikasi SIPD sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023.

Sebagai tindak lanjut atas Renja Tahun 2023 agar berjalan sesuai dengan rencana maka kebijakan yang diambil adalah :

- a. mengintegrasikan RKA 2023 ke Aplikasi SIRUP sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. menyusun rencana kinerja dan Rencana aksi Tahun Anggaran 2023;
- c. menyusun penetapan surat keputusan pengguna anggaran untuk pengelola kegiatan TA 2023.

Akhirnya semoga perencanaan dan penganggaran yang disusun dapat berhasil dan berdaya guna serta mampu mendorong pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Garut.

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**